

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (417912)

Laporan Keuangan **Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018** **(unaudited)**



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Hangtuah Ujung No. 124
Pekanbaru - 282861**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 23 Januari 2019

Kepala

Fathullah, S.T., M.S.c
NIP. 198611012009111001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
VI Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 23 Januari 2019

Kepala,

Fathullah, S.T., M.S.c
NIP. 198611012009111001

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan **BPPSI Pekanbaru** Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja, selama periode **1 Januari 2018** sampai dengan **31 Desember 2018**.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar *Rp. 740.000* atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar *Rp. 0,-*

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar ***Rp. 11.161.228.589*** atau mencapai 85,39 persen dari alokasi anggaran sebesar ***Rp. 13.070.420.000***

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar ***Rp. 15.262.990.922*** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar ***Rp. 251.125.100*** Aset Tetap (neto) sebesar ***Rp. 14.950.068.822*** dan Aset Lainnya (netto) sebesar ***Rp. 61.797.000***

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar sebesar ***Rp. 5.061.178*** dan ***Rp. 15.257.929.744***

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar ***Rp. 0*** sedangkan jumlah beban adalah sebesar ***Rp. 4.202.842.740*** sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai ***Rp. (4.203.842.740)*** Defisit kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar ***Rp. 202.900*** dan ***Rp. 0*** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar ***Rp. (4.203.639.840)***.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Laporan Tahunan 2018. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(4.203.639.840,-) kemudian ditambah/dikurang dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.19.461.569.584,-, sehingga terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp.15.257.929.744,-. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.15.257.929.744,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasar basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% Thd Anggaran	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	740.000	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	740.000	0,00	0
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.700.000.000	754.379.381	44,38	0
Belanja Barang	B.2.2	3.862.522.000	2.933.679.730	75,95	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	7.507.898.000	7.473.169.478	99,54	0
JUMLAH BELANJA		13.070.420.000	11.161.228.589	85,39	0

(Dalam Rupiah)

NERACA

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	2018	2017
Aset			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.5	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.6	0	0
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		0	0
Persediaan	C.7	251.125.100	0
Jumlah Aset Lancar		251.125.100	0
Aset Tetap			
Tanah	C.8	5.000.000.000	0
Peralatan dan Mesin	C.9	8.837.818.828	0
Gedung dan Bangunan	C.10	1.902.452.000	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	276.619.000	0
Aset Tetap Lainnya	C.12	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap	C.13	(1.066.821.006)	0
Jumlah Aset Tetap		14.950.068.822	0
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.14	80.732.000	0
Akumulasi penyusutan/Amortisasi aset lainnya	C.15	(18.575.000)	0
Jumlah Aset Lainnya		61.797.000	0
Jumlah Aset		15.262.990.922	0
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada pihak ketiga	C.16	5.061.178	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.061.178	0
Jumlah Kewajiban		5.061.178	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.17	15.257.929.744	0
Jumlah Ekuitas		15.257.929.744	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.262.990.922	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	754.379.381	0
Beban Persediaan	D.3	56.577.400	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.342.605.000	0
Beban Pemeliharaan	D.5	178.503.479	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.112.835.829	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	758.941.651	0
JUMLAH BEBAN		4.203.842.740	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.203.842.740)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		769.900	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		565.000	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		202.900	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0	0
POS LUAR BIASA	D.9		
Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.203.639.840)	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(4.203.639.840)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.5	0	0
JUMLAH		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	19.461.569.584	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	15.257.929.744	0
EKUITAS AKHIR		15.257.929.744	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI

A.1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian khususnya Pasal 14 mengamanatkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui peningkatan daya saing berlandaskan keunggulan sumber daya daerah. Seiring dengan amanat undang-undang di atas, arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing dan produktivitas, penumbuhan populasi industri, dan pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian menetapkan kebijakan prioritas industri nasional diantaranya yaitu pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai dan pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Pada sisi lain, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai berlaku Tahun 2015 menuntut Indonesia agar terus meningkatkan daya saing nasional (*competitive advantage*). Seperti diketahui bahwa kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa dan investasi akan bergerak bebas sesuai dengan kesepakatan. Bahkan pada kondisi ini tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbeda antar negara akan sangat berpengaruh dalam menentukan manfaat MEA diantara negara ASEAN.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan langkah nyata perbaikan agar Indonesia mampu menjadi pemain utama dan bukan hanya sebagai partisipan. Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik. Salah satu strategi untuk membendung banjirnya produk impor di Indonesia adalah dengan meningkatkan kemampuan dan nilai tambah industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gambar di bawah menunjukkan posisi industri nasional di ASEAN dimana Indonesia unggul di industri berbasis komoditas seperti kelapa sawit, kakao, karet dan lain-lain.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju adalah sektor industri yang maju. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan sumber daya alam sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi karena sektor ini terbatas baik dalam nilai tambah ataupun ketersediaannya. Sektor industri adalah sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu meningkatkan nilai tambah produk. Melalui penerapan teknologi di sektor industri maka produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan, selain teknologi juga dapat menumbuhkan industri pendukung dan kemudian menciptakan industrialisasi. Perekonomian nasional memiliki potensi yang besar untuk bertransformasi dari perekonomian berbasis komoditas primer menjadi perekonomian industri berbasis sumber daya alam.

Provinsi Riau memiliki potensi industri khususnya industri kelapa sawit. Produk olahan kelapa sawit di Riau adalah masih dalam produk mentah yakni CPO, padahal potensi pasarnya lebih besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan yang menghasilkan nilai tambah yang cukup besar. Demikian juga dengan produk karet alam, kelapa dan sagu belum tumbuh industri pengolahan produk jadi di daerah. Ke depan, pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan lokal ini menjadi kunci keberhasilan perekonomian daerah mempertahankan pertumbuhan ekonominya seiring output komoditas migas menyusut. Peralatan laboratorium dan rumah dinas yang berlokasi di Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Fasilitas dan infrastruktur litbang/perekayasaan yang tersedia di ex. Proyek PPTI Riau cukup memadai, terlebih untuk mendukung pengembangan industri yang tumbuh dengan pesat di daerah Riau dan prospek yang cukup menjanjikan serta kebutuhan dunia industri yang semakin meningkat. Maka dari itu sudah selayaknya ex Proyek PPTI Riau tersebut dijadikan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi guna mendukung pengembangan industri di daerah Riau dan sekitarnya. Apalagi sejak dicetuskannya Otonomi Daerah, Kementerian Perindustrian tidak lagi memiliki kepanjangan tangan di daerah, sehingga hubungan antara daerah dengan pusat secara hierarki terputus yang akhirnya menyebabkan pembinaan industri secara integral menjadi tidak optimal.

Melihat potret pertumbuhan ekonomi dan riwayat singkat keberadaan Proyek PPTI Riau, maka untuk mendukung pengembangan industri daerah khususnya Provinsi Riau dalam kegiatan pengembangan produk dan standardisasi diperlukan lembaga pemerintah yang resmi dengan bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian.

A.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Struktur Organisasi BPPSI Pekanbaru ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/12/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/7/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

A.1.3. Visi dan Misi

Maksud pembentukan BPPSI Pekanbaru dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian adalah untuk mengembangkan mutu produk, nilai tambah, dan daya saing industri di Provinsi Riau pada khususnya dan nasional pada umumnya. Tujuan pembentukan BPPSI Pekanbaru ini adalah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam pengembangan produk, standardisasi di bidang industri, khususnya peningkatan daya saing industri

berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki Provinsi Riau, mempunyai visi:

“Menjadi mitra terpercaya dalam pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri di Provinsi Riau”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) mengemban misi untuk meningkatkan daya saing dan Produktivitas.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian, dengan itu BPPSI mempunyai misi yaitu : Bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat industri, meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam (Sawit, Karet, Sagu, Kakao, dll).

A.1.4. Tujuan

Meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, seperti produk-produk Sawit, Karet, Sagu, Kakao dan turunannya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

A.1.5. Sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Terkait dengan pembentukan BPPSI Pekanbaru, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dan mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015–2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

A. Industri Prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015-2019, yaitu 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;

7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

B. Perwilayahan Industri

Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pembangunan industri dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terencana dan pendekatan spasial yang terintegrasi. Pendekatan sektoral yang terencana dilaksanakan melalui rencana pembangunan industri nasional, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Cakupan pelaksanaan pengembangan perwilayahan industri adalah Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa menjadi 29,36% : 70,64% pada tahun 2019;
2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional;
3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 14 kawasan yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2019; dan
4. Pembangunan 22 Sentra IKM baru.

Perwilayahan Industri dilakukan melalui percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Percepatan penyebaran industri dapat dilakukan dengan pembangunan industri di luar Jawa, atau melakukan relokasi industri eksisting di Jawa ke luar Jawa. Sedangkan, pemerataan pembangunan industri dapat diperoleh melalui penyebaran industri yang berdampak pada peningkatan PDRB sektor industri dan penyerapan tenaga kerja secara berimbang antara Jawa dan luar Jawa, termasuk pada daerah tertinggal. Upaya pemerataan ini erat kaitannya dengan

pembangunan pusat pertumbuhan industri yang akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) yang akan membawa kemajuan atau peningkatan bagi daerah sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, termasuk batas-batasnya.

1. Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
3. Pembangunan Kawasan Industri
4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Keberadaan Kawasan Industri Pelintung Dumai Propinsi Riau menyimpan potensi sebagai kluster industri sawit yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Unggul dari lokasinya yang strategis untuk perdagangan ekspor dan lokal. Tetapi, butuh dukungan infrastruktur pengembangan kawasan industri. Kawasan Industri Dumai telah berkembang pesat dibandingkan kawasan industri sawit lain yang dicanangkan pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang dibangunnya sebagai pelayanan jasa.

Kawasan industri Dumai bisa disebut kluster industri sawit pertama yang telah berkembang di Indonesia. Pengembangan kluster dan industri hilir kelapa sawit di kota Dumai, sangatlah sesuai dan didukung letak geografis wilayah tersebut. Dengan berada di dekat Selat Malaka dan Singapura, Dumai sangatlah cocok untuk dijadikan kota perdagangan dan industri. Dukungan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi syarat utama kluster industri sawit dapat berjalan. Selama ini kendala tidak terwujudnya kluster industri sawit akibat belum adanya akses jalan raya, pelabuhan, tanki CPO, pembangkit listrik, dan pengolahan limbah, serta lembaga penelitian dan pengembangan khususnya terhadap produk turunan kelapa sawit guna meningkatkan nilai tambah produk yang akhirnya meningkatkan devisa negara. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit, Pemerintah Indonesia telah meresmikan operasional CPOPC (Council of Palm Oil Production Countries) dimana Kementerian Perindustrian diberi tugas merencanakan dan membangun Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ) yaitu kawasan industri khusus pengolahan minyak sawit untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi standard industri hijau, lestari, berkelanjutan

dan ramah lingkungan. Salah satu Kawasan Industri yang dibangun adalah Kawasan Industri Pelintung Riau.

A.1.6. Program dan Tugas Khusus

Dalam tahun 2018, BPPSI melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Riset dan Standardisasi Industri dengan 4 (empat) *Output*, yaitu:

1. Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Pengembangan Produk sebanyak 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:

- a. Study *Global Value Chain* serta Teknologi Produk CPO dan Karet
- b. Analisis Mutu dan Pengembangan Produk-Produk Industri di Propinsi Riau

2. Kelembagaan Baristand Industri

Kegiatan yang dilakukan mencakup Standardisasi Produk, Uji Profisiensi, Kalibrasi Alat dan Sub Kontrak Pengujian sebanyak 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Akreditasi Laboratorium sesuai SNI ISO 17025
- b. Persiapan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

3. Layanan Internal (Overhead)

Kegiatan yang dilaksanakan pada layanan internal terdiri dari 8 layanan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kendaraan Bermotor
- b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- d. Pelayanan Perencanaan/ Penganggaran Internal
- e. Pelaksanaan Pelatihan SDM
- f. Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri
- g. Pelayanan Sistem Informasi Publik

h. Pengelolaan Data dan Informasi

4. Melaksanakan Layanan Perkantoran

Dalam rangka mencapai pelayanan prima, dalam tahun 2018 BPPSI Pekanbaru melaksanakan layanan perkantoran selama 12 bulan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- c. Operasional Perkantoran dan Pimpinan
- d. Perawatan Gedung Kantor
- e. Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
- f. Poliklinik/ Obat-Obatan
- g. Langganan Daya dan Jasa
- h. Pemeliharaan Peralatan Kantor/ Komputer/ Laboratorium dan Kendaraan Dinas.

A.1.7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran dan Indikator kinerja program/ kegiatan Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2018 dituangkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Tabel A. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya Kerjasama Riset dan Perekrayaan Industri	Studi Global Value Chain serta Teknologi Produk CPO dan Karet	2 Kajian
		Analisis Mutu dan Pengembangan Produk Industri di Propinsi Riau.	1 Laporan
2.	Terakreditasinya Laboratorium Uji dan Sistem Manajemen BPPSI	Akreditasi Laboratorium Uji sesuai ISO 17025	1 Laporan
		Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Sertifikat Akreditasi
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Sampel	75 Sampel
		Jumlah Industri/ Pelanggan yang dilayani	15 Pelanggan
		Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat	5 Orang
4.	Meningkatnya Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket Peralatan Laboratorium dan Saran Pendukung Balai	1 Paket
5.	Meningkatnya Standardisasi Industri	Jumlah Produk yang dapat dua Uji/ Sertifikasi	1 Jenis

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tingkat Eselon I. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri adalah sebagai berikut :

A.5.1. Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2 Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.3 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.5.5.1. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.5.5.2. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

A.5.5.3. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Tabel B. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

A.5.5.4. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

A.5.5.5. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel C. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.5.6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LRA

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri telah mengadakan enam kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi tersebut menyebabkan perubahan pagu anggaran dikarenakan ada penambahan Belanja Modal :

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1,700,000,000	1,700,000,000
Belanja Barang	3,862,522,000	3,862,522,000
Belanja Modal	5,137,478,000	7,507,898,000
Jumlah Belanja	10,700,000,000	13,070,420,000

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal peralatan dan mesin, Belanja modal lainnya, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal Jalan dan jembatan, dan belanja modal jaringan. Sedangkan belanja barang terdiri dari belanja barang perjalanan dinas, belanja barang persediaan, belanja barang dan jasa, dan belanja barang pemeliharaan.

B.1 Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2018, BPPSI Pekanbaru belum merupakan satker PNPB.

B.2. Belanja

Realisasi belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 11.161.228.589 atau sebesar 85,39 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 13.070.420.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA. 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

URAIAN	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Ang
Belanja Pegawai	1.700.000.000	754.379.381	44,38
Belanja Barang	3.862.522.000	2.933.679.730	75,95
Belanja Modal	7.507.898.000	7.473.169.478	99,54
Total Belanja Kotor	13.070.420.000	11.161.228.589	85,39
Pengembalian Belanja	-	(976.100)	-
JUMLAH	13.070.420.000	11.160.252.489	85,39

Perbandingan realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	754,379,381	-	-
Belanja Barang	2,933,679,730	-	-
Belanja Modal	7,473,169,478	-	-
Jumlah	11,161,228,589	-	-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA. 2018 dan TA. 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 754.379.381 dan Rp. 0. Realisasi belanja pegawai TA. 2018 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena BPPSI merupakan Satker Baru sehingga di TA. 2017 belum ada realisasi belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai TA. 2018 sebesar 44,38 % dikarenakan realisasi belanja pegawai hanya untuk 5 (lima) orang pegawai, sementara pagu yang direncanakan untuk 18 orang.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	250,938,914	-	-
Belanja Lembur	79,771,000	-	-
Belanja Uang Makan	26,206,000	-	-
Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	397,463,467	-	-
Jumlah Belanja Kotor	754,379,381	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	754,379,381	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang telah dilakukan GU Nihil dan telah dipertanggung-jawabkan serta disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018

Keterangan	31 Desember 2018
Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran	-
Jumlah	-

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker BPPSI biasanya berasal dari uang LS Bendahara yang belum dibayarkan kepada para pegawai.

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 Rp. 251.125.100,-.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2018

Persediaan	30 Desember 2018
Barang Konsumsi	54,555,000
Bahan untuk pemeliharaan	265,000
Pita cukai, materai, dan leges	-
Bahan Baku	79,084,100
Persediaan lainnya	117,221,000
Jumlah	251,125,100

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dihibahkan oleh Pemprov Riau kepada Kantor Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Per 31 Desember adalah sama yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 setelah disusutkan adalah Rp.8.837.818.828,-.

Rincian Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi tambah:	
Pembelian	6,597,732,474
Reklasifikasi Masuk Perubahan KIPS	2,240,086,350
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar Perubahan KIPS	0
Saldo per 31 Desember 2018	8,837,818,828

Mutasi tambah untuk peralatan dan mesin sebesar Rp.2.240.086.350,- adalah berupa Transfer Masuk dari Biro Umum dan BPPI Kementerian Perindustrian.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 adalah Rp.1.902.452.000,-. Nilai Gedung dan Bangunan ini berasal dari Transfer Masuk dari BPPI Kementerian Perindustrian, rinciannya adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah :	1.902.452.000
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2018	1.902.452.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 Rp.276.619.000,-. Tidak terjadi mutasi tambah atau mutasi kurang terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2018	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 Rp.0,. Aset Tetap Lainnya merupakan jenis aset yang berasal dari Bahan Perpustakaan Tercetak yaitu dalam bentuk barang berupa Monografi, Buku-

Buku Perpustakaan dan Aset Tetap Renovasi Ruang. Pada Semester II TA 2018 tidak terdapat mutasi tambah atas Aset Tetap Lainnya ini.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Desember Juni 2018	-

C.9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 Rp.(1.066.821.006),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2018

1	Peralatan dan Mesin	8.837.818.828	997.696.005	7.840.122.823
2	Gedung dan Bangunan	1.902.452.000	58.784.138	1.843.667.862
3	Jalan dan Jembatan	183.550.000	9.177.500	174.372.500
4	Jaringan	93.069.000	1.163.363	91.905.637
	Akumulasi Penyusutan	11.016.889.828	1.066.821.006	9.950.068.822

C.10. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud adalah merupakan bagian dari Aset Lainnya per 31 Desember 2018 Rp.80.732.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPPSI per 31 Desember 2018 terdiri dari *website dan antivirus*, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Saldo per 31 Desember 2018	-
Website	74.300.000
Antivirus	6.072.000
Saldo per 31 Desember 2018	80.372.000

C.11. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 Rp.0,-. Aset Lain-lain adalah merupakan bagian dari Aset Tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

C.12. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 Rp.(18.575.000),-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Aset Lainnya :			
	- Akumulasi Penyusutan Website	74.300.000	18.575.000	55.725.000
	Akumulasi Penyusutan	74.300.000	18.575.000	55.725.000

C.13. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2018 Rp.5.061.178,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPPSI per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2018

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
Beban tagihan yang masih harus dibayarkan	2.916.649	Beban tagihan listrik pemakaian bulan Desember 2018
Beban tagihan yang masih harus dibayarkan	2.144.529	Beban tagihan internet pemakaian bulan Desember 2018
Total	5.061.178	

C.14. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian Uang Muka dari KPPN disajikan sebagai berikut:

Rincian Uang Muka Dari KPPN

Persediaan	Per 31 Desember 2018	
Uang Muka dari KPPN :		
Uang Persediaan untuk Bendahara Pengeluaran	-	
Jumlah	-	

C.15. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,-. Utang Jangka pendek Lainnya saldo tahun lalu merupakan Utang Pajak Tunjangan Kinerja Pegawai yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2018.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Persediaan	Per 30 Juni 2018	Per 31 Des 2017
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.16. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 Rp. 15.257.929.744,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.17. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca Per 31 Desember 2018 Rp.15.262.929.744,-.

Rincian Jumlah Kewajiban dan Ekuitas disajikan sebagai berikut:

*Rincian Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pada Neraca
Per 31 Desember 2018*

Persediaan	Per 31 Desember 2018
Utang Jangka Pendek Lainnya :	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	15.257.929.744
Jumlah	15.257.929.744

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LO

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa, yang masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut :

D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 belum merupakan Satker PNBPN.

D.2. BEBAN OPERASIONAL

Jumlah Beban Operasional Semester II TA 2018 Rp.4.203.842.740,-.

Rincian dari Beban Operasional pada Laporan Operasional ini adalah berasal dari :

Rincian Beban Operasional Semester II TA 2018

URAIAN	SEMESTER II TA 2018
Beban Pegawai	754,379,381
Beban Persediaan	56,577,400
Beban Barang dan Jasa	1,342,605,000
Beban Pemeliharaan	178,503,479
Beban Perjalanan Dinas	1,112,835,829
Beban Penyusutan dan Amortisasi	758,941,651

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp.754.379.381,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER II TA 2018
Beban Gaji Pokok	189,269,302
Beban Pembulatan Gaji	1,788
Beban Tunj. Suami/Istri	13,433,330
Beban Tunj. Anak	4,682,092
Beban Tunj. Struktural	31,850,000
Beban Tunj. Fungsional	-
Beban Tunj. PPh	791,342
Beban Tunj. Beras	10,356,060
Beban Tunj. Umum	555,000
Beban Uang Makan	26,206,000
Beban Uang Lembur	79,771,000
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	397,463,467
Jumlah	754,379,381

Terdapat perbedaan sebesar Rp. 740.000,- antara jumlah rincian beban pegawai dengan beban pegawai keseluruhan. Hal tersebut disebabkan adanya pengembalian belanja yang tidak dapat dibebankan kepada salah satu akun belanja pegawai karena belum adanya akun tersebut di DIPA BPPSI Pekanbaru.

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Semester II TA 2018 Rp. 56.577.400,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER II TA 2018
Beban Persediaan Konsumsi	54,523,800
Beban Persediaan pita cukai, materai, leges	584,100
Beban Persediaan Lainnya	1,469,500

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.342.605.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penurunan anggaran untuk belanja barang dan jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:
(halaman berikutnya)

Rincian Beban Jasa Semester II TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2018
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9,730,372
Beban Keperluan Perkantoran	541,125,360
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	970,300
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	111,920,000
Beban Barang Operasional Lainnya	9,900,000
Beban Bahan	104,974,800
Beban Honor Output Kegiatan	158,550,000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	29,350,000
Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga	36,350,000
Beban Langganan Listrik	30,216,189
Beban Langganan Telepon	1,554,450
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,144,529
Beban Jasa Konsultan	980,000
Beban Jasa Profesi	276,300,000
Beban Jasa kepada BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga	6,831,000

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp.178.503.479,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian beban Pemeliharaan Semester II TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER II TA 2018
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111,353,910
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62,883,969
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	4,265,600
Jumlah	178,503,479

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp.1.112.835.829,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2018

URAIAN	SEMESTER II TA 2018
Beban Perjalanan Biasa	838,766,053
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,000,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126,150,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	135,919,776
Jumlah	1,112,835,829

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp.(758.941.651),-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester II TA 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SEMESTER II TA 2018
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(689,119,686)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(40,906,102)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	(9,177,500)
Beban Penyusutan Jaringan	(1,163,363)
Beban Penyusutan Amortisasi Software	(18,575,000)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	(758,941,651)

D.3 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

D.3.1 Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp.767.900,-. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ini yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

D.3.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp. 565.000,-. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ini juga sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2018 adalah Rp. 202.900,-

D.4 POS LUAR BIASA

D.4.1 Beban Luar Biasa

Beban pada Pos Luar Biasa Semester I TA 2018 adalah sebesar Rp.0,-.

D.5 SURPLUS / (DEFISIT) – LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO Semester II TA 2018 sebesar Rp. (4.203.639.840).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LPE

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal Per 31 Desember 2018 masing-masingnya adalah sebesar Rp.0.

E.2. SURPLUS / (DEFISIT) - LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 masing-masingnya adalah sebesar Rp.(4.203.639.840), Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR

Jumlah Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar berasal dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, yang mana untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.(0),-.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang masing-masingnya adalah sebesar Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang masing-masingnya adalah sebesar Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang masing-masingnya adalah sebesar Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan

hasil penyesuaian nilai aset tetap akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang masing-masingnya adalah sebesar Rp.(0),- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

URAIAN KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI	NILAI
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah	0

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang masing-masingnya adalah sebesar Rp.0,-.

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.19.461.569.584,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(740,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	11,161,228,589
Transfer Masuk	8,301,080,995
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	19,461,569,584

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp.(740.000),- sedangkan DKEL sebesar Rp.11.161.228.589,-.

E.4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 8.301.080.995 yang merupakan transfer Tanah dan Bangunan, Alat Laboratorium, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada.

E.5. KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.(15.257.929.744),-.

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Per 31 Desember 2018

Uraian	Jumlah		Kenaikan/ Penurunan
	30 Juni 2018	30 Juni 2017	%
Transaksi Antar Entitas	(15,257,929,744)	-	0.00
Jumlah	(15,257,929,744)	-	0.00

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.15.257.929.744,-.

Kantor Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Total Ak. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Tahun 2018	Per 31-12-2018	per 31-12-2018	Per 31-12-2018
A	Tanah							
1	Tanah	-	5,000,000,000	-	-	-		5,000,000,000
	Jumlah		5,000,000,000	-	-	-		5,000,000,000
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Besar Darat	110	29,425,000	-	1,471,250	5,885,000	7,356,250	22,068,750
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	630,429,500	-	61,904,215	244,157,143	306,061,358	324,368,142
3	Alat Bengkel Bermesin	10	433,200,000	-	21,660,000	7,400,000	29,060,000	404,140,000
4	Alat Ukur	5	370,652,150	-	37,065,215	-	37,065,215	333,586,935
5	Alat Pengelolaan	4	9,600,000	-	1,200,000	8,400,000	9,600,000	-
6	Alat Kantor	5	60,280,000	-	9,377,500	-	9,377,500	50,902,500
7	Alat Rumah Tangga	5	353,710,000	-	43,824,000	15,836,000	59,660,000	294,050,000
8	Alat Studio	5	58,722,300	-	5,872,230	-	5,872,230	52,850,070
9	Alat Kedokteran	5	28,985,000	-	5,797,000	-	5,797,000	23,188,000
10	Unit Alat Laboratorium	8	5,784,251,650	-	361,515,728	10,037,500	371,553,228	5,412,698,422
11	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	217,307,200	-	7,243,573	-	7,243,573	210,063,627
12	Alat Khusus Kepolisian	4	576,644,200	-	72,967,400	-	72,967,400	503,676,800
13	Komputer Unit	4	181,710,148	-	43,786,612	10,860,445	54,647,057	127,063,091
14	Peralatan Komputer	4	57,883,702	-	11,594,564	6,000,231	17,594,795	40,288,907
15	Sumur	10	39,407,978	-	1,970,399	-	1,970,399	37,437,579
16	Peralatan Olahraga	3	5,610,000	-	1,870,000	-	1,870,000	3,740,000
	Jumlah		8,837,818,828	0	689,119,686	308,576,319	997,696,005	7,840,122,823
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	1,484,896,000	-	33,288,018	15,145,874	48,433,892	1,436,462,108
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	202,180,000	-	5,464,324	2,732,162	8,196,486	193,983,514
3	Tugu/Tanda Batas	50	215,376,000	-	2,153,760	-	2,153,760	213,222,240
	Jumlah		1,902,452,000	0	40,906,102	17,878,036	58,784,138	1,843,667,862
D	Jalan dan Jembatan							
1	Jalan	10	183,550,000	-	9,177,500	-	9,177,500	174,372,500
	Jumlah		183,550,000	0	9,177,500	0	9,177,500	174,372,500
E	JARINGAN							
1	Jaringan Listrik	40	93,069,000	-	1,163,363	-	1,163,363	91,905,637
	Jumlah		93,069,000	0	1,163,363	-	1,163,363	91,905,637
	Total		16,016,889,828	-	740,366,651	326,454,355	1,066,821,006	9,950,068,822